



**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI
KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT
PADA RESES MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2018-2019
TANGGAL 14 FEBRUARI – 18 FEBRUARI 2019**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI selalu memantau dan mengawasi berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja. Untuk itu, Komisi IX DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja ke 3 (tiga) Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Jawa Barat. Untuk kunjungan kerja ke Jawa Barat akan dikonsentrasikan ke Kabupaten Sumedang.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja, Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan serta pengawasan obat dan makanan, Komisi IX DPR RI mengharapkan mendapatkan masukan secara langsung, baik dari Pemerintah Daerah, mitra kerja maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/APBN dan juga untuk memonitor pelaksanaan Program-Program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di daerah tujuan kunjungan kerja. Selain itu, kunjungan kerja juga bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI. Hasil kunjungan kerja akan menjadi bahan pembahasan dengan kementerian terkait dan mitra kerja lainnya.

1.2 Dasar Kegiatan

- a. Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja berkelompok dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019.
- b. Keputusan Rapat Internal Komisi IX DPR RI, tanggal 8 Januari 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

- a. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-undangan dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI.
- b. Menggali informasi realisasi program dan anggaran yang dibiayai APBN.
- c. Memetakan permasalahan masyarakat dan memonitor Pelaksanaan Program-Program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
- d. Menyerap aspirasi masyarakat Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Sumedang terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI.

1.4 Peserta

Adapun susunan lengkap anggota rombongan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI sebagai berikut:

NO	NO. ANGG.	NAMA	KETERANGAN	FRAKSI	DAPIL
1.	A - 415	Dede Yusuf Macan Effendi	Ketua Tim	Demokrat	Jabar II
2.	A - 260	Ichsan Firdaus	Anggota	Golkar	Jabar V
3.	A - 536	Dra. Ermalena, MHS	Anggota	PPP	NTB
4.	A - 150	Ir. Ketut Sustawan	Anggota	PDIP	Jabar I
5.	A - 184	DR. Dewi Aryani, S.Sos.,M.Si	Anggota	PDIP	Jateng IX
6.	A - 198	Ir. Budi Yuwono, Dipl. SE	Anggota	PDIP	Jatim VI
7.	A - 202	Abidin Fikri, SH	Anggota	PDIP	Jatim IX
8.	A - 238	Delia Pratiwi Br. Sitepu	Anggota	Golkar	Sumut III
9.	A - 258	Dewi Asmara, SH	Anggota	Golkar	Jabar IV
10.	A - 300	Imanuel Ekadianus Blegur	Anggota	Golkar	NTT II

11.	A - 301	Julianus Pote Leba	Anggota	Golkar	NTT II
12.	A - 315	Drg. Andi Fauziah Pujiwatie	Anggota	Golkar	Sulsel III
13.	A - 349	Drg. Putih Sari	Anggota	Gerindra	Jabar VII
14.	A - 428	Dra. Lucy Kurniasari	Anggota	Demokrat	Jatim I
15.	A - 449	dr. Verna Gladies Merry	Anggota	Demokrat	Sulteng
16.	A - 477	H. Haerudin, S.Ag.,MH	Anggota	PAN	Jabar XI

II. GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Geografis Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat yang didirikan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950). Kabupaten Sumedang terdiri atas 26 kecamatan, 7 kelurahan dan 270 desa. Sebagian besar wilayah Sumedang adalah pegunungan, kecuali di sebagian kecil wilayah utara berupa dataran rendah. Sumedang dilintasi jalur utama Bandung – Cirebon.

Kabupaten Sumedang di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, sebelah selatan dengan kabupaten Garut dan Bandung, sebelah barat dengan Kabupaten Bandung dan Subang dan sebelah utara dengan Kabupaten Indramayu dan Majalengka. Beberapa universitas seperti IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri), UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) dan ITB (Institut Teknologi Bandung) serta Universitas Padjajaran berlokasi di kabupaten ini yaitu di Kecamatan Jatinangor.

Peta Administratif Kabupaten Sumedang



Sumber: Bappeda Sumedang

2.2 Kondisi Demografis

Kondisi Demografis Jumlah dan pertumbuhan penduduk merupakan indikator yang menunjukkan tentang keadaan komposisi distribusi dan kecepatan penduduk di suatu daerah. Yang dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang pada pertengahan tahun 2016 tercatat sebanyak 1.118.719 jiwa, terdiri dari Laki-laki sebanyak 566.245 jiwa dan Perempuan sebanyak 552.474 jiwa. Kabupaten Sumedang dengan luas wilayah 155.871,98 Ha, tingkat kepadatan penduduk mencapai rata-rata sebesar 717,72 jiwa/ km². Kepadatan Penduduk per Km² 7,06 %, sedangkan dilihat dari sex ratio yaitu sebesar 102,49%.

III. HASIL KUNJUNGAN KERJA

UMUM

3.1 Potensi Perekonomian

Kabupaten Sumedang memiliki potensi perekonomian yang beragam, termasuk potensi agrobisnis dan peternakan. Didominasi oleh daerah pegunungan, membuat daerah Sumedang memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang cukup menjanjikan. Bahkan sebagian besar penduduk Sumedang menjadikan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian mereka sehari-hari. Jumlah produksi padi di Kecamatan Buahdua, Conggeang, Jati Gede dan Tomo, mencapai 408.643 ton pada tahun 2006. Sumedang juga menghasilkan palawija seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kedelai dan kacang tanah untuk mencukupi kebutuhan lokal dan beberapa daerah lainnya di sekitar kabupaten tersebut. Disamping itu, beberapa daerah di Kabupaten Sumedang juga kaya akan sayuran dan buah-buahan. Mulai dari cabe merah, bawang merah, cabe rawit, kubis, ketimun, sampai aneka macam buah-buahan segar, tersebar di berbagai kecamatan sehingga tidak heran bila sebagian besar masyarakat mulai memanfaatkan potensi tersebut untuk mendatangkan untung besar setiap bulannya.

Adapun potensi peternakan di daerah Sumedang ternyata tidak kalah potensial bila dibandingkan dengan sektor pertanian yang cukup mendominasi daerah tersebut. Selama ini hewan ternak yang dikembangkan masyarakat antara lain sapi pedaging, sapi perah, kerbau, kuda, domba, serta hewan unggas (seperti ayam buras, itik, dan lain-lain). Populasi sapi Sumedang mencapai 29.840 ekor dan tersebar di Kecamatan Jatigede, Jatinunggal, dan Pamulihan. Sedangkan untuk domba banyak ditemukan di daerah Cimanggung, dan Pamulihan.

3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia Jawa Barat sudah dua tahun ini berstatus “tinggi”, di mana sejak 2016 berubah status dari “sedang” menjadi “tinggi”. Perubahan status ini menunjukkan adanya peningkatan capaian pembangunan manusia di Jawa Barat. Tahun 2017 capaian IPM Jawa Barat mencapai 70,69, meningkat 0,64 poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 70,05. Jika dibandingkan dengan IPM Indonesia (nasional), sejak 2010 hingga 2017 IPM Jawa Barat selalu berada di bawah angka IPM nasional. Pada tahun 2017 IPM nasional mencapai 70,81, lebih tinggi sebesar 0,12 dibandingkan Jawa Barat. Terdapat sembilan provinsi yang capaian IPM 2017 lebih tinggi dari capaian IPM nasional, dan 25 provinsi lainnya termasuk Jawa Barat memiliki capaian IPM lebih rendah dari capaian IPM nasional.

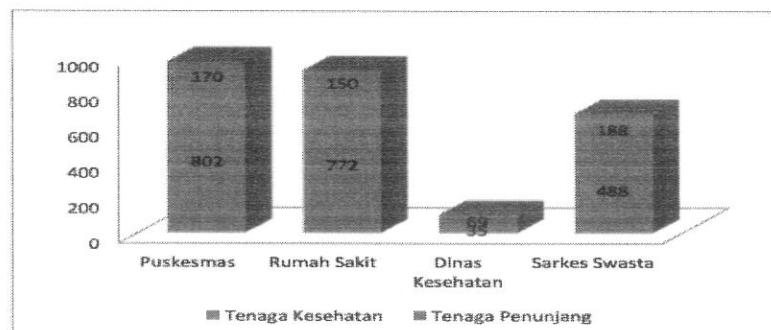
Adapun di jajaran provinsi di Pulau Jawa, IPM Jawa Barat berada pada posisi keempat, setelah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Banten. Pada tahun 2017 ini seluruh provinsi di Pulau Jawa telah mencapai status pembangunan manusia “tinggi” (IPM antara 70 - 80). Setelah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami perubahan status dari “sedang” menjadi “tinggi”.

Untuk Kabupaten Sumedang, IPM di tahun 2017 sebesar 70,07 yang naik sebesar 0,89 point jika dibandingkan dengan IPM tahun 2016 yang di angka 69,45. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Barat, capaian IPM Kabupaten Sumedang pada posisi IPM “Tinggi”.

BIDANG KESEHATAN

3.3 Sarana Kesehatan dan SDM Kesehatan

Sumber daya Kesehatan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kesehatan. Sumber daya kesehatan dapat berupa sumber daya manusia/tenaga kesehatan, sarana prasarana kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan.



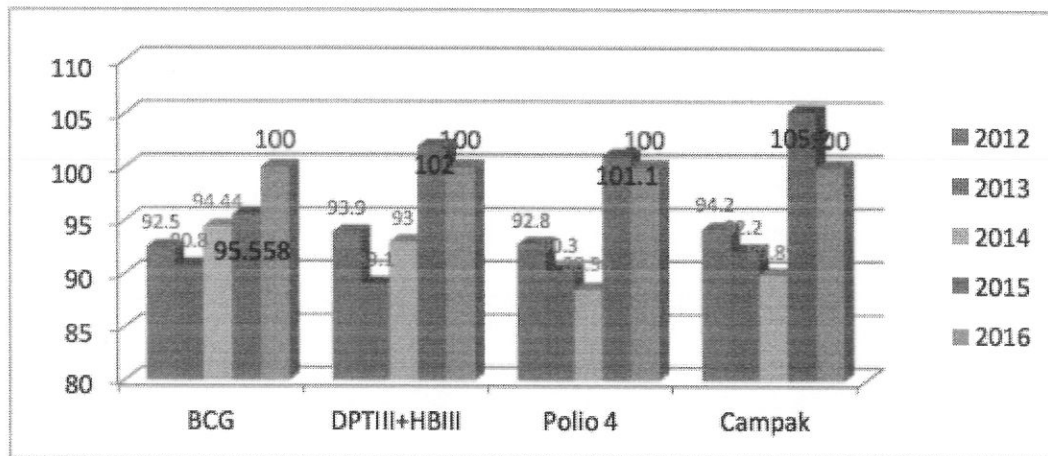
Berdasarkan gambar diatas dapat terlihat bahwa sebaran tenaga kesehatan paling banyak berada di puskesmas yang tersebar di 35 puskesmas dan rumah sakit, dimana tenaga di rumah sakit ini berasal dari data rsud Kabupaten Sumedang, RSUD Pakuwon dan RSUD Harapan Keluarga (yang baru berdiri pada akhir tahun 2016). Sedangkan tenaga penunjang dalam hal ini asisten tenaga kesehatan dan penunjang administrasi paling banyak berada di sarana kesehatan swasta sebanyak 188 orang yang tersebar di klinik, apotek dan praktek mandiri tenaga kesehatan.

No	Tenaga Kesehatan	Berdasarkan Tempat Praktik	Berdasarkan Orang
1	Dokter Umum	306	256
2	Dokter Gigi	59	29
3	Dokter Spesialis	93	48
4	Perawat	768	766
5	Farmasi	197	190
6	Kesehatan Masyarakat	48	48
7	Gizi	36	36
8	Sanitarian	37	37
9	Bidan	481	481
11	Tenaga Teknis Medis	100	100
12	Fisioterapis	6	3

Tabel diatas menggambarkan keadaan tenaga kesehatan di Kabupaten Sumedang dimana terlihat tenaga kesehatan dengan jumlah paling banyak adalah tenaga perawat sebanyak 768 orang dimana sebaran tenaga perawat paling banyak terdapat di rumah sakit tepatnya di RSUD dan tenaga kesehatan yang masih jarang atau bahkan belum ada tenaganya yaitu tenaga dalam rumpun tenaga teknis medis. Data Tenaga Kesehatan diatas merupakan hasil penjumlahan tenaga PNS dan non PNS baik yang bekerja di Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, RS Pakuwon, RS Harapan Keluarga (yang baru berdiri pada akhir tahun 2016), dan fasilitas kesehatan swasta seperti klinik dan praktek mandiri tenaga kesehatan.

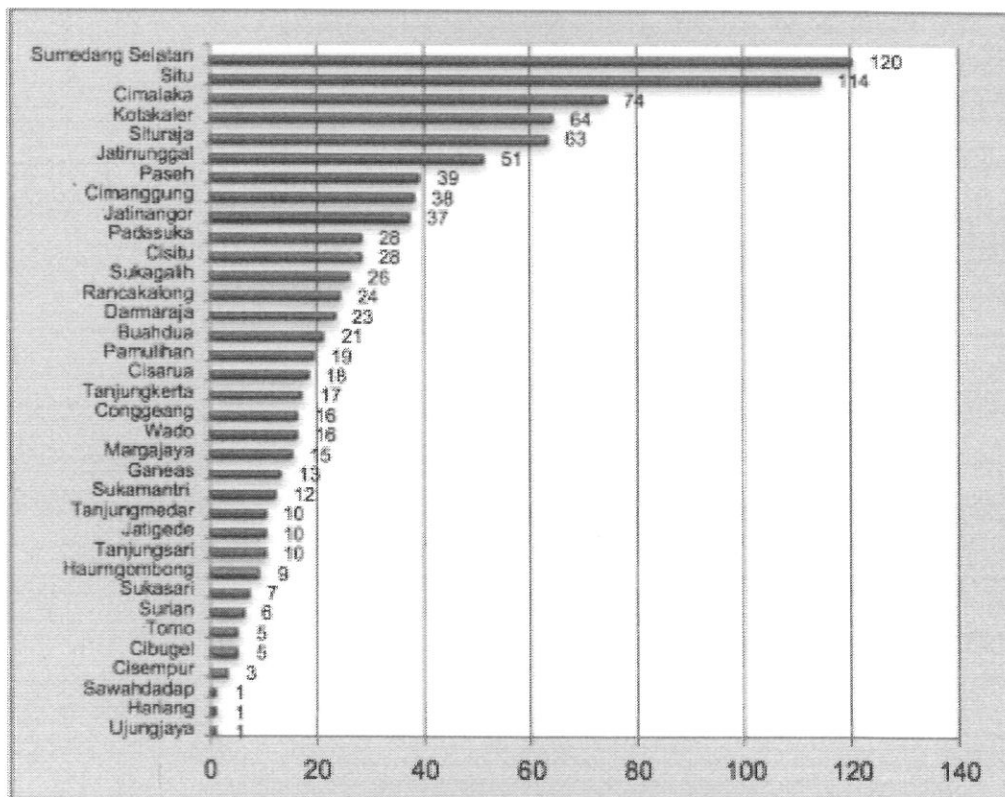
3.4 Cakupan Imunisasi

Program imunisasi merupakan salah satu program prioritas yang dinilai sangat efektif untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi. Cakupan imunisasi pada umumnya mengalami kenaikan, setiap jenisnya sejalan dengan hal tersebut cakupan UCI desa mengalami kenaikan dari 92,6 % menjadi 100 %.



3.5 Demam Berdarah

Berdasarkan data laporan tiap Puskesmas di Kabupaten Sumedang Tahun 2017 jumlah kasus DBD tercatat sebanyak 944 kasus. Kasus DBD tertinggi ditemukan di Wilayah Kerja Puskesmas Sumedang Selatan yaitu sebanyak 120 kasus sedangkan kasus terendah ditemukan di wilayah kerja Puskesmas Sawahdadap, Hariang dan Tomo yang hanya ditemukan masing-masing 1 kasus.



3.6 Pengawasan Obat dan Makanan

Luas wilayah Kabupaten Sumedang yang 1.518 km² dengan waktu tempuh terjauh sekitar 2,5 s/d 3 jam membuat pengawasan obat dan makanan harus melakukan efisiensi dan pemilihan target pengawasan. Sarana Produksi Pangan (MD&IRT) di Kabupaten Sumedang berjumlah 576 di tahun 2017 dan di Jawa Barat sekitar 18.121, sehingga total sarana produksi pangan yaitu 3 %. Adapun sarana produksi dan pelayanan farmasi sejumlah 215 sarana dan jika dibandingkan dengan jumlah sarana di Jawa Barat yang sebanyak 13.952 buah maka hanya sekitar 1,5% yang ada di Kabupaten Sumedang.

Kajian resiko pengawasan untuk kabupaten Sumedang rata-rata belum tinggi sehingga focus pengawasan secara proporsional memang lebih intens untuk wilayah dengan kajian resiko pengawasan yang tinggi seperti Kab/Kota Bekasi, Kab/Kota Cirebon dan Kota Bandung. Semakin maraknya penjualan produk secara *online* dan tidak transparan sehingga menyulitkan penyidik untuk menemukan actor intelektual. Selain itu, kurangnya peran aktif masyarakat karena tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, masyarakat masih kurang memahami dampak buruk dari penggunaan produk sediaan farmasi dan pangan yang tidak memenuhi syarat sehingga mempengaruhi kelancaran dalam melakukan penyidikan.

Beberapa kendala yang dihadapi Balai Pengawasan Obat dan Makanan yaitu jumlah pengawas pangan di daerah kurang; sistem mutasi di Pemda Kab/Kota yang menyebabkan tenaga pengawas yang sudah dilatih dipindahkan ke bagian lain; tidak semua wilayah mengalokasikan anggaran untuk mencetak pengawas pangan dan melakukan pengawasan/pembinaan secara rutin; *feedback* tindak lanjut dari dinas masih kurang; dan data jumlah sarana SPP-IRT yang ada di setiap Kab/Kota yang dimiliki Balai Besar POM di Bandung tidak akurat, sehingga menyulitkan dalam pengawasan.

BIDANG KETENAGAKERJAAN

3.7 Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Sumedang

Arah pembangunan (visi) ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang yaitu “terwujudnya ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang optimal di tahun 2018”, dengan jabaran misi: (1) meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, (2) meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha serta pengembangan pasar kerja, (3) meningkatkan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dan (4) meningkatkan penempatan transmigran.

Program pembangunan bidang ketenagakerjaan kabupaten Sumedang tahun 2017-2018 terutama dalam menghadapi tantangan bonus demografi 2030 yaitu: (a) program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, (b) program peningkatan ketenagakerjaan, (c) program perluasan kesempatan kerja, (d) program peningkatan sarana hubungan industrial, (e) program perlindungan pengembangan ketenagakerjaan, (f) program peningkatan lembaga hubungan industrial, (g) program peningkatan kesempatan kerja.

Berikut profil ketenagakerjaan kabupaten Sumedang:

No	Uraian	Tahun	
		2017	2018
1	Jumlah penduduk	1.135.818	1.146.435
2	Angkatan kerja	521.369	544.805
3	Bekerja	482.857	505.827
4	Pengangguran	38.512	38.978
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,38	7,15
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,90	62,06
7	Pencaker terdaftar	14.114	12.004
8	Pencaker terdaftar ditempatkan	2.283	2.433
9	Jumlah perusahaan	914	914
10	Jumlah buruh/pekerja	63.116	63.116
11	Jumlah peserta jamsostek	49.623	59.599
12	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	35	35

Capaian pembangunan ketenagakerjaan di kabupaten Sumedang dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Indikator kinerja	Capaian awal tahun	2016	2017	2018
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	43	79.43	80.00	86.5
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	81	44.44	81.08	81
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	80	59.76	64.42	85.93
4	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang	23.48	15.00	16.18	20

No	Indikator kinerja	Capaian awal tahun	2016	2017	2018
5	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	25	15	16	100
6	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	71.56	89.43	78.62	94
7	Besaran pemeriksaan perusahaan	35.63	37.50	-	Alih kewenangan
8	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	55.58	100	-	Alih kewenangan
9	Jumlah lokasi calon penerima transmigran	3	3	-	1
10	Penanganan pemindahan penduduk miskin asal wilayah genangan Jatigede melalui pola sisipan pedesaan	4.250	-	-	-
11	Penanganan pemindahan penduduk miskin asal wilayah genangan Jatigede melalui resettlement	600	-	-	-

Berdasarkan pada perhitungan proyeksi perencanaan ketenagakerjaan di kabupaten Sumedang, dapat terlihat jumlah kebutuhan tenaga kerja berdasarkan proyeksi kesempatan kerja:

Kelompok Usia	2016	2017	2018	2019	2020
15 - 19	25,647	24,054	22,159	19,982	18,242
20 - 24	133,530	153,245	172,731	190,592	212,903
25 - 29	114,924	113,363	109,828	104,160	100,009
30 - 34	200,231	214,134	24,915	231,258	240,726
35 - 39	107,909	103,859	98,788	91,699	86,173
40 - 44	207,077	225,970	242,186	254,093	269,888
45 - 49	125,924	130,187	132,191	131,396	132,225
50 - 54	98,900	108,448	118,954	124,234	131,356
55 - 59	69,460	80,221	90,996	101,042	113,587
60+	59,530	59,634	50,992	77,353	83,745
Jumlah	1,143,132	1,213,115	1,263,740	1,325,810	1,388,854

Adapun hambatan dan tantangan yang dihadapi adalah:

No	Aspek	Hambatan dan tantangan
1	Bidang pembinaan kelembagaan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - program pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK masih belum sesuai dengan kebutuhan pasar - masih kurangnya SDM pengelola dan instruktur LPK yang berkompeten
2	Bidang hubungan industrial	<ul style="list-style-type: none"> - masih rendahnya kualitas dan kuantitas fasilitas komunikasi antara pekerja dengan pengusaha - masih adanya permasalahan hubungan natar pekerja dengan pengusaha - kurangnya pemahaman pengusaha tentang hak-hak pekerja - kurangnya tenaga profesional mediator hubungan industrial
3	Bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> - masih rendahnya kualitas lulusan BLK/LPK untuk bisa diserap/ditempatkan - kurang efektifnya informasi pasar kerja - belum tersedianya fungsional pengantar kerja - belum optimalnya Kepres 04 tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan - jumlah kesempatan kerja yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah angkatan kerja yang ada
4	Bidang transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> - keterbatasan kuota transmigrasi - belum tersedianya lahan untuk transmigran - masih rendahnya kuantitas SDM bidang transmigran - belum tersedianya SDM penggerak swadaya masyarakat

Dalam rangka penanggulangan hambatan dan tantangan dalam penciptaan lapangan kerja produktif, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kbaupaten Sumedang telah melakukan langkah-langkah preventif, diantaranya: (1) melakukan pelatihan penciptaan wirausaha baru dengan berbasis pada potensi lokal dan kebutuhan pasar, (2) pemberian bantuan peralatan usaha, (3) bersinergi dengan *stakeholder* lainnya, termasuk buyer dna supplayes dalam tahap proses latihan dan pasca latihan sehingga alumni pelatihan benar-benar kompeten dan dapat memulai usaha pasca latihan, (4) membentuk forum komunikais lembaga latihan dengan industri daerah yang disahkan oleh surat keputusan Bupati, (5) pembentukan desa produktif.

3.8 Upah Minimum

Dengan dikeluarkannya surat edaran tahun 2019 dari Kementerian Tenaga Kerja khususnya tentang kenaikan upah minimum menjelang penetapan UMK/UMP, pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota dewan pengupahan kabupaten Sumedang. Dewan pengupahan kabupaten Sumedang terdiri dari unsur pemerintah 6 (enam) orang ditambah 1 (satu) orang dari dewan pakar, 3 (tiga) orang dari unsur pengusaha, dan 3 (tiga) orang dari unsur pekerja.

Sejak berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengawasan ketenagakerjaan diserahkan kepada provinsi, sehingga pengawasan secara normatif tentang pelaksanaan UMK diserahkan kepada Balai Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah IV Jawa Barat. Adapun kabupaten sebatas memonitoring UMK. Kondisi perusahaan dalam hal UMK sejak tahun 2016 UMK kabupaten Sumedang yang tadinya dua nilai menjadi satu nilai pada tahun 2017 mengakibatkan perusahaan yang ada di wilayah kabupaten kota keberatan.

Tahun	Kota	Kawasan
2013	1.100.000	1.352.158,78
2014	1.155.000	1.735.473
2015	1.295.000	2.041.000
2016	1.443.925	2.275.715
2017	2.463.461,49	
2018	2.678.028,99	
2019	2.893.074,72	

3.9 Outsourcing

Berdasarkan hasil laporan perusahaan yang melaporkan ke dinas ketenagakerjaan tahun 2017, jumlah perusahaan yang mendaftarkan pemborongan pekerjaan/jasa penunjang terdiri dari 4 (empat) perusahaan yaitu 1 (satu) perusahaan outsourcing terdiri dari 42 (empat puluh dua) orang pekerja dan 3 (tiga) perusahaan yang hanya mendaftarkan bukti pencatatan. Sementara pada tahun 2018, jumlah perusahaan yang mendaftarkan pemborongan pekerjaan/jasa penunjang terdiri dari 16 (enam belas) perusahaan yaitu 1 perusahaan outsourcing terdiri dari 54 orang pekerja dan 15 perusahaan yang hanya mendaftarkan bukti pencatatan.

Sampai sejauh ini, permasalahan di kabupaten Sumedang mengenai permasalahan outsourcing sejak 3 (tiga) tahun ke belakang sudah tidak ada. Hal ini dikarenakan penerapan Permen nomor 19 tahun 2012 serta surat Edaran Menteri nomor 4 tahun 2013 dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan penyedia jasa dan pemborongan pekerjaan.

Selain itu, sampai sejauh ini belum ada pelaporan dari pihak pekerja dengan keberatan terhadap kurangnya hak-hak normatif yang diberikan kepada pekerja, khususnya pekerja outsourcing.

3.10 Hubungan Industrial

Penyelesaian perselisihan dapat dilaksanakan dengan baik 100% dapat diselesaikan di kabupaten Sumedang sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak ada penyelesaian perselisihan melebihi batas yang telah ditentukan adalah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dimediasi. Peran serikat pekerja dan pengusaha dalam hal penyelesaian perselisihan sangat baik karena sebelum ke tingkat mediasi dianjurkan dulu untuk tingkat bipartit antara pengusaha dan pekerja dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk diberikan kesempatan kepada pengusaha dan SP/SB menyelesaikan secara bipartit. Apabila penyelesaian tingkat bipartite tidak tercapai kesepakatan, maka pemerintah mempunyai tugas untuk menyelesaikan melalui mediasi yang diarahkan untuk BP.

Rata-rata penyelesaian dapat dilaksanakan dengan kurang dari waktu yang telah ditentukan. Namun ada kendala yang erring dihadapi, diantaranya:

- a. ketidaktahuan proses tata cara mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, khususnya untuk perusahaan yang tidak punya SPSB,
- b. jumlah fungsional mediator di kabupaten Sumedang sudah tidak ada karena telah menjadi struktural dan minat yang kurang dari ASN untuk menjadi mediator hubungan industrial,
- c. tempat untuk melkakukan sidang mediasi masih menempati ruang rapat kantor, dan tidak mempunyai tempat khusus untuk mediasi.

3.11 Balai Latihan Kerja (BLK)

Pemerintah kabupaten Sumedang melalui visi misi Bupati terpilih yaitu di Misi 5 (Kreatif) mempunyai tujuan yaitu mewujudkan masyarakat kabupaten Sumedang menjadi pelaku ekonomi dalam persaingan global. Dimana kebijakannya adalah meningkatkan infrastruktur pendukung kreativitas dan inovasi masyarakat. Adapun salah satu programnya adalah pendidikan dan pelatihan kewirausahaan muda dari setiap desa melalui Gerkan Wirausaha Muda (Garuda) yang difasilitasi oleh BLK untuk mengembangkan kompetensi dan kewirausahaan untuk menekan angka pengangguran.

Di kabupaten Sumedang terdapat 1 (satu) BLK. kejuruan yang dimiliki diantaranya: teknologi mekanik, listrik, tata niaga, pertanian, bangunan, otomotif, dan lainnya. Melalui dana APBD telah direncanakan

pengalokasian dana untuk revitalisasi BLK, diantaranya pembangunan asrama. Pemetaan keunggulan dalam rangka persiapan BLK yang fokus pada upaya peningkatan keahlian angkatan kerja sesuai potensi daerah yaitu kerjasama BLK dengan gerakan wirausaha muda melalui berbagai pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan.

Peran BLK kabupaten Sumedang guna menjawab kebutuhan SDM berkualitas dan siap pakai dalam menghadapi era globalisasi yaitu melalui kunjungan dan kerjasama ke perusahaan-perusahaan untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja di dunia industri dan juga melakukan penyesuaian program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang yang dituangkan dalam bentuk MOU, serta menyesuaikan pelatihan dengan melihat potensi SDM dan SDA pada masing-masing daerah.

- a. tantangan yang dihadapi adalah perkembangan peralatan di dunia industri yang begitu pesat (4.0) sehingga belum bisa diikuti oleh BLK berkenaan dengan penyediaan alat pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri,
- b. dalam rangka memaksimalkan penempatan lulusan BLK perlu dilakukan terobosan melalui forum komunikasi sehingga tidak menggunakan jasa percaloan,
- c. adanya keterbatasan SDM instruktur disebabkan banyak yang memasuki masa pensiun,
- d. kesulitan mendata alumni peserta pelatihan yang sudah bekerja baik bekerja di sektor formal maupun informal.

Upaya yang ditempuh dalam mengoptimalkan peran BLK ditengah anggapan pencari kerja yang masih belum memahami sepenuhnya fungsi dan manfaat BLK adalah dengan melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat secara massif: (a) sosialisasi ke kecamatan, desa, sekolah SMA sederajat, pesnatren, BKK, PKBM, karang taruna, dan PKH yang ada di wilayah kabupaten Sumedang, (b) publikasi melalui media sosial berupa testimoni keberhasilan alumni peserta pelatihan yang telah sukses, media radio, televisi lokal, surat kabar, dan spanduk yang dipasang di tempat umum.

Kemajuan dan keberhasilan program dan kegiatan BLK kabupaten Sumedang dalam 3 (tiga) tahun terakhir diantaranya: BLK sudah mulai semakin dikenal masyarakat, mendapatkan alokasi dana untuk pelatihan yang besar dari APBD dan APBN (Kemnaker), saran prasarana di BLK sudah ada peningkatan, dan adanya animo yang bagus dari masyarakat terhadap pelatihan. Keberhasilan lainnya yaitu kurang lebih 40% alumni siswa pelatihan telah bekerja di Jepang, wilayah Sumedang, Jabotabek,

Bandung, serta berwirausaha di masing-masing desa. Untuk tahun ini, dari dana APBD tahun anggaran 2019, BLK Sumedang telah merencanakan untuk mengadakan pelatihan pembuatan batik kasumedangan sebanyak 2 (dua) paket yang akan diikuti oleh 32 (tiga puluh dua) orang peserta.

3.12 BPJS Ketenagakerjaan

Perusahaan yang mendaftar & tidak mendaftar Jamsos	Pekerja yang terdaftar & tidak terdaftar Jamsos	Kepesertaan dari penerima upah & bukan penerima upah
Jumlah perusahaan: 1085 perusahaan		
Jumlah yang mendaftar: 748 perusahaan	Jumlah pekerja yang terdaftar: 83.348 pekerja	Jumlah pekerja penerima upah: 384.223 pekerja
Jumlah yang tidak mendaftar: 337 perusahaan	Jumlah pekerja yang tidak terdaftar: 86.240 pekerja	Jumlah pekerja bukan penerima upah: 96.806 pekerja

3.12 Tenaga Kerja Asing (TKA)

Undang-undang nomor 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi pintu gerbang masuknya investasi asing ke Indonesia. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi iklim usaha di Indonesia. Sementara, di kabupaten Sumedang terdapat 16 (enam belas) perusahaan yang merupakan investor asing yang bergerak dalam bidang textile, makanan, dan kabel. Adapun jumlah tenaga kerja asing adalah 89 orang yang terdiri dari 84 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.

Adapun pertumbuhan TKA berdasarkan data laporan TKA di kabupaten Sumedang dari tahun 2016-2018 adalah sebesar 20,21%, dengan rincian: tahun 2016 jumlahnya 328 TKA, tahun 2017 jumlahnya 358 TKA, dan tahun 2018 jumlahnya 394 TKA.

IV. REKOMENDASI

Setelah melakukan diskusi dan membahas permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sumedang serta melakukan peninjauan ke BLK dan RSUD Kabupaten Sumedang, maka Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Bidang Kesehatan

1. Komisi IX DPR RI mendukung program Layad Rawat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang melakukan jemput bola untuk mendekatkan pelayanan kesehatan yang utamanya untuk kegawatdaruratan, kecelakaan lalu lintas dan juga untuk lansia. Hal-hal seperti ini bisa direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya dan Kementerian Kesehatan RI dapat menjadikan program ini *lesson learnt* untuk penguatan pelayanan kesehatan di tingkat primer dan kedaruratan.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk melakukan peremajaan Tenaga Pengawas Pangan untuk daerah-daerah dan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan perekrutan Tenaga Pengawas ini untuk menghindari adanya pemindahtugasan Tenaga Pengawas yang sudah terlatih.
3. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Kesehatan untuk terus melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam melakukan sosialisasi program JKN dan juga integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan sehingga target *universal Health Coverage* (UHC) sebesar 95% pada bulan Juni 2019 dapat tercapai.
4. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk segera melakukan pembayaran atas klaim yang telah ditagihkan oleh RSUD Sumedang sebesar RP 9,8 Milyar. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan RSUD tetap diberikan dengan memperhatikan kualitas dan kebutuhan masyarakat.
5. Komisi IX DPR RI terus mengingatkan pentingnya gerakan masyarakat untuk melakukan PSN guna menanggulangi banyaknya kasus demam berdarah. Apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan melakukan PSN secara serentak bisa juga dilakukan oleh pemerintah daerah lain dan Kementerian Kesehatan RI harus mengambil langkah-langkah inisiatif.
6. Terhadap angka stunting Kabupaten Sumedang sebesar 28 %, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan melakukan kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengingat faktor utama pencetus stunting adalah permasalahan sanitasi lingkungan serta menggalakkan program germas dan PHBS.

Bidang Ketenagakerjaan

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk lebih memperhatikan BLK di Provinsi Jawa Barat, terutama BLK di kabupaten Sumedang terkait dengan pengembangan BLK, fasilitas BLK berdasarkan kebutuhan industri, dan ketersediaan instruktur atau tenaga pelatih yang profesional di BLK.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk dapat menyalurkan atau mendistribusikan para lulusan BLK ke perusahaan dan turun langsung melakukan sidak serta mengoptimalkan peran pengawas ketenagakerjaan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pungli penyaluran calon pekerja yang sedang mencari pekerjaan.
3. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa hak-hak dan perlindungan pekerja perempuan terpenuhi di perusahaan, misalnya: cuti haid, cuti keguguran, cuti hamil dan melahirkan, ketersediaan ruang ibu menyusui, dan lain sebagainya.
4. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya dan memperluas kepesertaan pekerja bukan penerima upah.

V. PENUTUP

Demikian Laporan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat ini kami sampaikan. Semoga menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait, terima kasih.

Jakarta, Februari 2019

**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI
KE KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT
KETUA TIM,**

Ttd

DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, ST., M.I. POL

A- 415